

Tiga Menentang Stigma: Liem Koen Hian, Siauw Giok Tjhan, Soe Hok Gie

YERRY WIRYAWAN

Di Indonesia ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa identitas ketionghoan dan keindonesiaan adalah dua hal yang bertolak belakang.

Mereka berpandangan bahwa menjadi orang Tionghoa, dalam arti mempertahankan identitas dan kebudayaan Tionghoa, berarti memilih menjadi orang asing, pro-Cina dan tidak Indonesia.

Sebaliknya, menjadi Indonesia diartikan menanggalkan identitas dan kebudayaan ketionghoan tersebut. Pandangan ini kemudian diterapkan secara sistematis oleh Pemerintah Orde Baru kepada masyarakat Tionghoa sepanjang masa pemerintahannya dan masih kuat tersimpan di benak sebagian orang di Indonesia hingga hari ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemisahan identitas Tionghoa dari keindonesiaan berawal dari praktek kolonial di Nusantara di mana penduduk Tionghoa dipisahkan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Di masa tersebut, masyarakat Tionghoa selalu ditempatkan sebagai orang asing dalam peraturan-peraturan pemerintah dengan tujuan agar masyarakat Tionghoa tetap terpisah dari masyarakat lokal. Keterpisahan masyarakat jajahan ini penting bagi pemerintah kolonial untuk memudahkan penguasaannya. Karenanya proses-proses yang disebut oleh Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) sebagai "integrasi wajar" seringkali

dihambat oleh peraturan-peraturan kolonial tersebut antara lain dengan memperketat batasan-batasan kampung Tionghoa atau surat ijin untuk bepergian meskipun sebenarnya peraturan-peraturan tersebut tidak sepenuhnya dapat menahan laju integrasi. Dalam bidang sosial politik dan budaya kita bisa menemukan berbagai contoh sebaliknya di mana masyarakat Tionghoa dan masyarakat sekitarnya saling mempengaruhi dan bahkan membentuk masyarakat dengan kebudayaan campuran baru yang disebut Peranakan.

Dampak politik pemisahan masyarakat Tionghoa dari masyarakat tanah jajahan lainnya menunjukkan buahnya pada masa pasca kolonial. Saat pecah perang kemerdekaan Indonesia, loyalitas nasionalisme masyarakat Tionghoa seringkali dipertanyakan oleh sekelompok politisi nasionalis. Pada saat itu orang Tionghoa dilihat sebagai bukan Indonesia dan pro-Belanda. Sebuah pandangan yang sangat tidak tepat karena mengabaikan keberagaman masyarakat Tionghoa. Padahal di saat yang sama, dalam periode awal kemerdekaan identitas Indonesia sedang dalam proses merumuskan definisinya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya proses dekolonisasi belum sepenuhnya berhasil mengikis warisan-warisan kolonial yang berlanjut di era kemerdekaan.

Pada bagian berikutnya akan disajikan tiga figur tokoh Tionghoa yang dengan pilihan hidupnya masing-masing, menentang stigma masyarakat Tionghoa sebagai bukan orang Indonesia. Ketiga figur ini melewati fase-fase hidup yang sulit di zamannya dan mengalami nasib tragis dalam pilihannya sebagai bangsa Indonesia. Ketiganya orang Tionghoa yang bergulat untuk menjadi orang Indonesia.

Liem Koen Hian

Tokoh pertama adalah Liem Koen Hian. Dia adalah seorang Tionghoa kelahiran Banjarmasin, Kalimantan, pada tahun 1896. Ayahnya bernama Liem Ke An seorang pengusaha. Dia mengenyam pendidikan



di sekolah Belanda namun tidak selesai. Di kemudian hari, dia mengambil sekolah hukum di Jakarta. Liem Koen Hian sempat bekerja di perusahaan minyak di Balikpapan. Namun dia tidak merasa betah dengan pekerjaan kantornya ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi wartawan. Saat itu jamak terjadi

bahwa seorang wartawan peranakan menjadi seorang nasionalis. Liem Koen Hian sempat menjadi editor di sejumlah majalah Tionghoa antara lain *Tjhoen Tjhioe* (1915-1916), *Soo Lim Po* (1917), *Sinar Sumatra* (1918-1921) dan *Pewarta Soerabaia* (1921-1925). Pada tahun 1920-an, Liem Koen Hian menyatakan meninggalkan nasionalisme Tionghoa dan mengadopsi nasionalisme Indonesia. Gagasan nasionalisme Indonesia di masyarakat Tionghoa ini berkembang saat ia menjadi editor di koran *Soeara Publiek* (1925-1929), *Sin Jit Po/Sin Tit Po* (1929-1932; 1939) dan *Kong Hoa Po* (1937-1938).

Pada tahun 1930-an, kesadaran politik Liem Koen Hian berkembang semakin pesat. Pada bulan September 1932, dia bersama sejumlah tokoh Peranakan mendirikan partai pertama masyarakat Tionghoa yang disebut Partai Tionghoa Indonesia

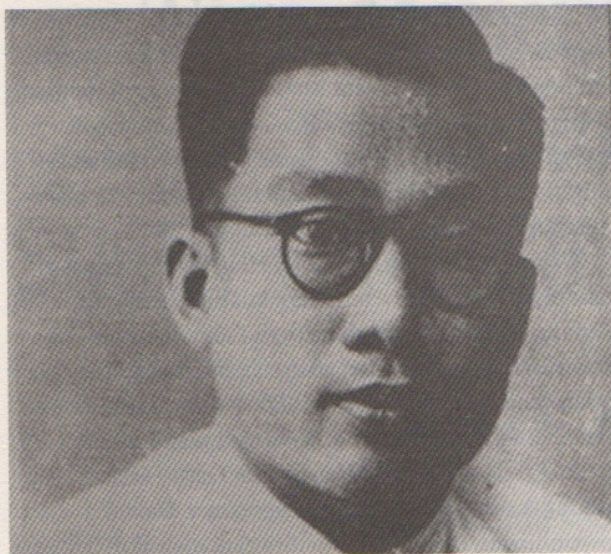
(PTI). Partai ini dengan jelas menyatakan dukungannya kepada gerakan nasionalis Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. Liem Koen Hian diangkat menjadi ketua pertama partai ini (1932-1933). Namun saat partai Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) terbentuk tahun 1937, Liem Koen Hian meninggalkan PTI untuk bergabung dengan partai beraliran kiri ini.

Sikap nasionalis Liem Koen Hian terlihat jelas dalam pandangannya terhadap kuatnya pengaruh Jepang saat itu. Pada tahun 1938 Liem menerbitkan buku anti Jepang. Akibat sikapnya ini, Liem Koen Hian sempat ditahan pemerintah Jepang namun masa penahanannya tidak lama. Pada saat pembentukan BPPKI yang diketuai Soekarno dan Hatta, Liem ditunjuk sebagai salah satu anggotanya. Dalam perundingan Renville, Liem ditunjuk mewakili delegasi Indonesia pada tahun 1947. Keikutsertaan Liem Koen Hian dalam badan resmi pemerintah Indonesia ini perlu diberi catatan khusus karena partisipasinya dalam pemerintahan awal Republik Indonesia menembus batas-batas Tionghoa dan Indonesia.

Liem tertarik dengan perkembangan gerakan komunis di Tiongkok. Pada tahun 1950, Liem Koen Hian ikut mendirikan Persatuan Tenaga Indonesia (PTI Baru), sebuah partai multi rasial. Tahun 1951, Liem Koen Hian ditangkap oleh pemerintah Sukiman yang mencurigainya sebagai komunis. Peristiwa ini sangat memukul Liem Koen Hian. Setelah lepas dari penjara, dengan penuh kekecewaan Liem Koen Hian melepaskan kewarganegaraan Indonesianya yang ironisnya telah diperjuangkannya selama 20 tahun terakhir. Setahun kemudian, 1952, dia meninggal di Medan dengan status sebagai warga negara Tiongkok. (Suryadinata, 2015: 91-92).

Siauw Giok Tjhan

Siauw Giok Tjhan lahir tahun 1914 di Kapasan, sebuah wilayah pecinan di Surabaya. Ayahnya bernama Siauw Gwan Swie yang adalah seorang Peranakan. Ibunya Kwan Tjan Nio adalah putri seorang Totok Hakka. Keluarga ibu dari Siauw masih memegang ketat adat istiadat Tionghoa. Mereka menyetujui putrinya menikah dengan seorang Tionghoa peranakan dengan syarat anak pertama mereka dikirim ke sekolah Tionghoa. Di kemudian hari, sebagai anak pertama Siauw Giok Tjhan dikirim belajar ke Tiong Hoa Hwe Koan pada tahun 1918. Namun saat ayah mertua Siauw pulang ke Tiongkok pada tahun 1920, Siauw Giok



Tjhan dipindahkan sekolahnya ke sekolah Belanda dan selanjutnya ELS (*Europeesche Lagere School*, sekolah dasar Belanda). Saat kakek dari pihak ibunya kembali ke Surabaya, dia terkejut mendapatkan bahwa cucunya, Siauw Giok Tjhan tidak bisa bahasa Tionghoa. Akibatnya Siauw dipaksa bekerja di toko kakeknya setelah pulang dari sekolah HBS.

Di sekolah Belanda ini, Siauw Giok Tjhan belajar bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda. Dengan kemampuan bahasanya yang luas ini, Siauw sangat menggemari membaca cerita-cerita roman dan detektif dalam bahasa-bahasa asing yang dikuasainya itu. Dia juga membaca koran-koran Tionghoa Melayu yang dilanggankan ayahnya seperti *Pewart Soerabaia* dan *Sin Tit Po*. Beragamnya pendidikan yang sempat dienyam Siauw memberikan ketrampilan berbahasa asing yang pada gilirannya memperluas wawasannya.

Pada saat depresi ekonomi di akhir tahun 1920-an, ayah Siauw mengalami kebangkrutan. Kakeknya menjual bisnisnya dan kemudian kembali ke Tiongkok. Pada tahun 1932, kedua orang tua Siauw meninggal dunia dalam waktu berdekatan saat dirinya masih bersekolah di tahun terakhir HBS. Dalam usia yang relatif muda yaitu 18 tahun, Siauw menjadi yatim piatu dan harus mengurus adiknya. Di saat ini pula Siauw mulai tertarik dengan politik dengan ikut aksi boikot yang dipimpin Liem Koen Hian menentang kesebelasan sepak bola Belanda di Surabaya. Akibat aksinya ini, Siauw diskors dari sekolahnya selama seminggu.

Kesadaran politik Siauw semakin meningkat dalam

periode ini. Dia mengaggumi Liem Koen Hian dan bergabung dengan *Sin Tit Po*. Namun saat koran *Mata Hari* berdiri tahun 1934 sebagai corong PTI, Siauw bergabung dengan koran ini di Semarang. Pada tahun 1937, Siauw kembali ke Surabaya untuk memimpin kantor *Mata Hari* di kota tersebut. Di Surabaya ini Siauw berkenalan dengan aktivis-aktivis politik radikal Tionghoa yang membangkitkan minatnya pada Marxisme dan perjuangan anti Fasis.

Setelah Kwee Hing Tjiat, editor *Mata Hari* meninggal tahun 1939, Siauw menggantikannya sebagai editor kepala koran tersebut dan berkantor di Semarang. Di kota ini pula Siauw bertemu dengan calon istrinya Tan Gien Hwa, putri seorang pedagang sukses di Pemalang. Mereka menikah tahun 1940.

Pada masa pendudukan Jepang, kantor *Mata Hari* ditutup dan para stafnya diinternir. Untungnya saat itu Siauw sedang tidak ada di kantor sehingga lolos dari penangkapan. Pada masa pendudukan Jepang ini, Siauw bersembunyi di Malang. Namun kemudian dia menjadi pemimpin Kakyō Shokai, sebuah organisasi milisi Tionghoa bentukan Jepang. Di organisasi ini dia mengajak pemuda-pemuda Tionghoa untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk kerjasama dengan milisi-milisi Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Siauw semakin aktif dalam dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Sosialis di awal pembentukannya di bulan Desember 1945. Pada bulan April 1946, Soekarno menunjuknya sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), sebuah lembaga yang menjalankan fungsi parlemen pada awal masa kemerdekaan. Siauw juga ditunjuk sebagai menteri urusan minoritas dalam kabinet Amir Syarifudin. Jabatan-jabatan politik ini menunjukkan partisipasi politik Siauw dalam pemerintahan awal Indonesia.

Namun kabinet Amir jatuh. Siauw bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai oposisi pemerintah Hatta. Kembali kita melihat di sini aktivitas politik Siauw yang tidak hanya bepolitik mendukung pemerintah namun juga meluas menjadi oposisi. Saat terjadi peristiwa Madiun, dirinya ikut tertangkap meskipun statusnya adalah anggota parlemen. Tahun 1949, dia baru dibebaskan dan kembali aktif dalam dunia politik sebagai anggota Badan Pekerja dan kemudian menjadi anggota DPR RIS.

Aktivitas jurnalistik Siauw Giok Tjhan kembali

ditekuni pada awal tahun 1950-an. Di bulan Januari 1950, Siauw menerbitkan *Sunday Courier* dan sebagai editor *Republik*. Setahun kemudian dia menerbitkan *Suara Rakjat* yang pada bulan Juli 1951 menjadi *Harian Rakjat*. Koran ini memiliki sejarah yang penting. Pada tahun 1953, koran *Harian Rakjat* ini dibeli PKI dari Siauw Giok Tjhan dan menjadi organ resmi partai tersebut. Siauw sendiri tetap menjadi kontributor koran *Harian Rakjat* dan menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh PKI seperti Njoto dan Tan Lin Djie. Terlihat di sini meskipun tidak pernah secara resmi menjadi anggota PKI, namun Siauw menunjukkan simpatinya pada kelompok radikal kiri.

Sebagai anggota parlemen, Siauw adalah seorang pembela komunitas Tionghoa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Dia juga menentang keras diskriminasi ekonomi kepada masyarakat Tionghoa. Peranan politiknya yang terbesar adalah saat menjadi ketua Baperki yang didirikan pada bulan Maret 1954. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini menjadi organisasi terbesar Tionghoa Indonesia yang anggotanya disebutkan mencapai 300 ribu orang. Organisasi ini mengusulkan agar masyarakat dan kebudayaan Tionghoa dianggap sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Dengan begitu masyarakat dan kebudayaan Tionghoa tidak perlu mengubur kebudayaan leluhurnya. Sikap ini paling sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat Tionghoa saat itu.

Peranan Baperki tidak hanya membela persoalan kewarganegaraan tapi juga semakin meluas dalam bidang pendidikan. Saat itu sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan Kuomintang ditutup dan pemerintah mengharuskan anak-anak yang berkewarganegaraan Indonesia untuk bersekolah di sekolah nasional. Baperki menjawab kebutuhan sekolah tersebut dengan menyediakan sekolah-sekolah bagi anak-anak Tionghoa. Pada tahun 1960 organisasi bahkan mendirikan URECA (Universitas Res Publica).

Meskipun Baperki sebenarnya bukan organisasi politik, namun pada tahun 1955 mendapatkan 180.000 suara sehingga memperoleh satu kursi di parlemen. Siauw mendapatkan dukungan luas dari kelompok Peranakan dan masyarakat Totok termasuk juga kelompok pebisnis dan intelektual. Pengaruhnya sangat kuat di lingkungan politisi Indonesia saat itu.

Saat pecah Peristiwa 1965, Baperki yang dianggap

dekat dengan PKI ditutup dengan paksa oleh militer. Siauw turut ditangkap beserta sejumlah pemimpin Baperki. Siauw ditahan selama sepuluh tahun. Pada tahun 1978, dia baru diijinkan ke Belanda untuk pengobatan. Namun selama di Belanda, meskipun tengah sakit keras, Siauw tetap aktif berpolitik. Beberapa saat sebelum memberikan kuliah di Universitas Leiden pada 20 November 1981, Siauw terkena serangan jantung dan meninggal. Siauw Giok Tjhan meninggal jauh dari Tanah Air yang dicintainya. (Suryadinata, 2012: 970-973)

Soe Hok Gie

Lahir di Jakarta tahun 1942. Ayahnya seorang penulis sastra bernama Soe Lie Piet dan sempat menjadi editor sejumlah koran Melayu Tionghoa pada masa kolonial. Aktivitas jurnalistik ini menurun pada anak-anaknya, termasuk Soe Hok Gie. Berbeda dengan Liem Koen Hian dan Siauw Giok Tjhan yang sempat mengenyam pendidikan Belanda dan Tionghoa, Soe Hok Gie mendapat pendidikan hampir semuanya di sekolah nasional. Dia menyelesaikan sarjananya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dalam bidang sejarah pada tahun 1969. Melihat latar belakang pendidikannya ini, Soe Hok Gie lebih dekat dengan aktivitas di masyarakat non-Tionghoa meskipun dia juga sempat aktif di lembaga Tionghoa bernama LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, lawan dari Baperki) yang didirikan tentara dan menjadi editor jurnalnya, *Bara Eka*, antara tahun 1964-1965. Setelah Peristiwa 1965, Soe Hok Gie aktif di gerakan mahasiswa. Dia menjadi salah satu tokoh mahasiswa yang menggulingkan pemerintahan Soekarno. Pada masa ini, dia menjadi editor *Mahasiswa Indonesia* yang diterbitkan di Bandung. Pada tahun 1968-1969, Soe menjadi ketua senat FSUI.

Meskipun anti Soekarno, Soe Hok Gie merupakan pionir pengkritik pemerintahan Orde Baru melalui tulisannya yang secara terbuka mengemukakan kondisi tahanan politik dan praktek korupsi pada saat itu. Dia aktif menulis di *Sinar Harapan* dan *Kompas*. Dalam berbagai tulisannya di catatan harian maupun surat-surat kepada kawan-kawannya, Soe Hok Gie menyatakan kekecewaannya akan pemerintahan yang baru ini dan kondisi sosial politik sekitarnya.

Selain aktif dalam kegiatan politik, Soe Hok Gie juga seorang pencinta alam. Dia aktif mendaki gunung-gunung di Jawa. Hingga kemudian pada tanggal 16



Desember 1969, dia meninggal di gunung Semeru. (Suryadinata, 2015: 258-259)

Ketiga tokoh kita, Liem Koen Hian, Siauw Giok Tjhan, dan Soe Hok Gie adalah figur-figur yang lahir sebagai orang Tionghoa yang berani menembus batas-batas stigma yang dilekatkan kepada masyarakat Tionghoa. Seiring dengan pendidikan dan aktivitas-aktivitasnya, Liem Koen Hian dan Siauw Giok Tjhan dengan penuh keyakinan memilih aktivitas politik dengan berpihak mendukung kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Soe Hok Gie yang besar di era kemerdekaan, kecuali aktif sebentar di LPKB, mengisi sebagian masa aktif hidupnya sebagai anak muda Indonesia di kegiatan sosial politik di organisasi-organisasi non-masyarakat Tionghoa. Dengan caranya masing-masing ketiga orang ini dengan jelas memperlihatkan upayanya menembus anggapan orang Tionghoa yang eksklusif dan terpisah dari masyarakat Indonesia.

Kesamaan dari ketiga orang ini adalah mereka tumbuh besar di dunia jurnalistik. Mereka mendapatkan pengetahuan dari bacaan yang luas berkat penguasaan bahasa asing. Mereka adalah figur-figur yang otodidak dalam menambah pengetahuan. Pengetahuan yang luas ini pada gilirannya menjadi modal penting dalam sikap-sikap politik mereka.

Namun ketiganya memiliki kesamaan di akhir hidup yang tragis. Liem Koen Hian kecewa di akhir hidupnya karena kabinet Sukiman memperlakukannya dengan buruk dan mengabaikan keberpihakan-keberpihakan politiknya pada Indonesia. Siauw Giok Tjhan mengalami penahanan selama 10 tahun tanpa sebab-sebab yang jelas. Dia meninggal jauh dari Tanah Airnya sementara hak-hak politiknya tetap dicabut. Soe Hok Gie meninggal di gunung Semeru dengan kekecewaan melihat perkembangan sosial politik pemerintahan Orde Baru di mana ia turut andil dalam pendiriannya.

Ketiga tokoh ini memberi pesan kepada kita akan tidak mudahnya menjadi bagian bangsa Indonesia bagi orang Tionghoa, sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi tersendiri dan disadari oleh masyarakat Tionghoa. Namun demikian masyarakat ini hingga kini tetap memilih pilihan tersebut dengan penuh keyakinan untuk tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia. ●

Dr. Yerry Wiryawan,

dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Leo Suryadinata. *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary*. Singapore: ISEAS, 2012.
- _____. *Prominent Indonesian Chinese : Biographical Sketches*. 4th edition. Singapore: ISEAS, 2015.